

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

OLEH:

**KHAIRANI
NIM. 4012017085**



**PRGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021 M / 1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1
dalam Program Perbankan Syariah**

Diajukan Oleh:

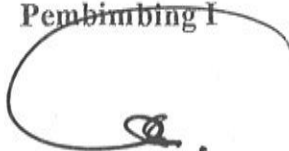
KHAIRANI

Nim. 4012017085

**Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Perbankan Syariah**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Iskandar M. CL
NIDN: 2016066502

Pembimbing II



Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A
NIDN: 2011118901

Mengetahui

An. Ketua Prodi

Sekretaris Perbankan Syariah



Fakhrizal, Lc., M.A.
NIP. 198502182018011001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Langsa" an Khairani, NIM 4012017085 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 01 Juli 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 01 Juli 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I



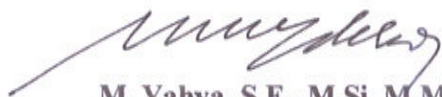
Dr. Iskandar, M.CL
NIP: 196506161995031002

Penguji II



Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A
NIP: 198911112020121015

Penguji III



M. Yahya, S.E., M.Si, M.M
NIP: 196512311999051001

Penguji IV



Fakhrizal, Lc., M.A
NIP: 198502182018011001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Iskandar, M.CL
NIP: 196506161995031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairani
NIM : 4012017085
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota
Langsa

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Februari 2021

Hormat saya,



Khairani

Motto

*...Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka...
(QS. Ath-Thalaq: 2-3)*

ABSTRAK

Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2002-2019. Metode analisis data menggunakan persamaan regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian diperoleh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil uji t diketahui secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil uji F diketahui secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,972 atau 97,2% Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dapat menjelaskan kemandirian keuangan.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK dan Kemandirian Keuangan

ABSTRACT

The purpose of this research was to see the effect of Regional Original Accounts (PAD), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) on regional financial independence. This study uses secondary data from the years 2002-2019. Methods of data analysis using multiple linear regression equations, t test, F test and the coefficient of determination (R^2). The results of this study have a positive effect on financial independence and the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund have a negative effect on regional financial independence. The test results show that partially the Regional Original Income has a significant effect on regional financial independence, the General Allocation Fund has a significant effect on regional financial independence and the Special Allocation Fund has no significant effect on regional financial independence. The results of the F test show that simultaneously the Regional Original Income, the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund simultaneously have a significant effect on financial independence. The test results of the coefficient of determination (R^2) obtained 0.972 or 97.2% of Regional Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds can explain financial independence.

Keywords: PAD, DAU, DAK and Financial Independence

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, menuju zaman peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi penerang bagi perjalanan hidup umat manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat. Skripsi dengan judul “Analisis Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Langsa”, tulisan ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi atas izin Allah SWT., dan bantuan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi penulis dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasi sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.C.L, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

4. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.C.L, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan starf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
6. Kedua orang tua saya ayah dan ibu. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Teman-teman, terima kasih atas semangat, do'a dan untuk kebersamaan kita yang luar biasa, semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik.
8. Semua keluarga, yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ilmiah yang berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Penulis

Khairani

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	L
'	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ل	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ----	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) ta marbutahhidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- 2) ta marbutahmati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalaupun kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Perumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5.1 Tujuan Penelitian	7
1.5.2 Manfaat Penelitian	8
1.6 Penjelasan Istilah.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
2.1 Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.2. Dana Perimbangan.....	21
2.2.1. Pengertian Dana Perimbangan	21
2.2.2. Pengertian Dana Alokasi Umum	23
2.2.3. Pengertian Dana Alokasi Khusus	25
2.3 Kemandirian Keuangan Daerah	28
2.3.1. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah	28
2.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.....	29
2.4 Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Kemandirian Keuangan	30
2.4.1. Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan	30
2.4.2. Pengaruh DAU terhadap Kemandirian Keuangan	31
2.4.3. Pengaruh DAK terhadap Kemandirian Keuangan	31
2.5 Penelitian Terdahulu	32
2.6 Kerangka Konsep	38
2.7 Hipotesis	39

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel	43
3.6 Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
4.1. Gambaran Umum Kota Langsa	50
4.2 Statistik Deskriptif.....	54
4.3 Uji Asumsi Klasik	59
4.3.1. Uji Normalitas	60
4.3.2. Uji Multikolinearitas	61
4.3.3. Uji Heterokedastisitas	61
4.3.4. Uji Autokorelasi	62
4.4 Uji Regresi Linier Berganda	63
4.5 Hasil Uji Hipotesis	64
4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66
4.7 Analisis	67
4.7.1. Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	67
4.7.2. Pengaruh DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	67
4.7.3. Pengaruh DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Gambaran Umum Kota Langsa	69
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah	30
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	44
Tabel 4.1	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2002-2019	59
Tabel 4.2	Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.3	Uji Autokorelasi.....	62
Tabel 4.4	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	63
Tabel 4.5	Hasil Analisis Uji T	64
Tabel 4.6	Uji F (Simultan)	66
Tabel 4.7	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Langsa Tahun 2002-2019	5
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Teoritis	39
Gambar 4.1	Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2002-2019	55
Gambar 4.2	Dana Alokasi Umum Kota Langsa Tahun 2002-2019	56
Gambar 4.3	Dana Alokasi Khusus Kota Langsa Tahun 2002-2019	57
Gambar 4.4	Kemandirian Keuangan Kota Langsa Tahun 2002-2019	58
Gambar 4.5	Histogram	60
Gambar 4.6	Scaterplot.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Kemandirian.....	72
2. Data Untuk Persamaan Regresi Yang di Log	73
3. Output SPSS.....	74
4. table DW	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah ini berdasarkan penerapan otonomi daerah dengan Undang-undang tentang Otonomi Daerah.¹ dan undang-undang tentang pemerintahan daerah,² serta Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,³ serta pembaharuannya Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemerintah Daerah.⁴ Dengan adanya peraturan berdasarkan undang-undang tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dapat dikelola secara baik oleh setiap pemerintah daerah yang dilakukan secara desentralisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Penyelenggaraan desentralisasi terkait dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya adalah dengan pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya masing-masing dan memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal guna terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Namun penerapan konsep otonomi daerah dapat menciptakan kesenjangan pembangunan antar daerah. Hal ini terlihat bagi daerah kaya akan potensi

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 tahun 1999* Tentang Otonomi Daerah, (Jakarta, 1999).

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 32 tahun 2003* Tentang Pemerintah Daerah, (Jakarta, 2004).

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 tahun 2004* Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, (Jakarta, 2004).

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 tahun 2014* Tentang Pemerintah Daerah, (Jakarta, 2014).

daerahnya memiliki struktur yang lebih seimbang dan akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang memiliki potensi lokal yang rendah.

Undang-undang yang menyatakan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya,⁵ dalam hal ini daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Kemudian dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Serta yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional.⁶

Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dimiliki daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 32 tahun 2003* Tentang Pemerintah Daerah, (Jakarta, 2004).

⁶Batafor. G.G, *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten lembata-Provinsi NTT*, (Tesis Pascasarjana Denpasar, 2011), hlm. 56.

kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti: bantuan pemerintah atau pinjaman. PAD dapat mempengaruhi kemandirian suatu daerah, karena dapat mencerminkan kondisi daerah tersebut. Besar PAD yang meningkat maka semakin mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Selain pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan juga berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.⁷ Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemberian dana perimbangan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan asli daerah (PAD), maka pemerintah pusat menggunakan dana perimbangan untuk menutupi kekurangan belanja daerah. Jika transfer dari pemerintah pusat semakin banyak maka hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Dengan demikian, tingkat kemandirian daerah tersebut masih sangatlah rendah.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 30 tahun 2004* Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, (Jakarta, 2004).

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio atas laporan keuangan suatu daerah. Analisis rasio merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu perkiraan dengan perkiraan lain dalam laporan keuangan yang sama dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kelamahan dan kemampuan keuangan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah kabupaten maupun kota antara lain rasio kemandirian yaitu perbandingan PAD dengan Transfer pusat ditambah dengan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja.⁸Rasio pertumbuhan dari PAD yang diperoleh setiap tahunnya yang menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen.⁹

Beberapa penelitian tentang kemandirian daerah yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Berdasarkan penelitian dengan judul “Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Rutin terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)”. Hasil penelitian menunjukkan PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja rutin tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian terdahulu dengan judul

⁸Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: YKPN, 2012), hlm. 101.

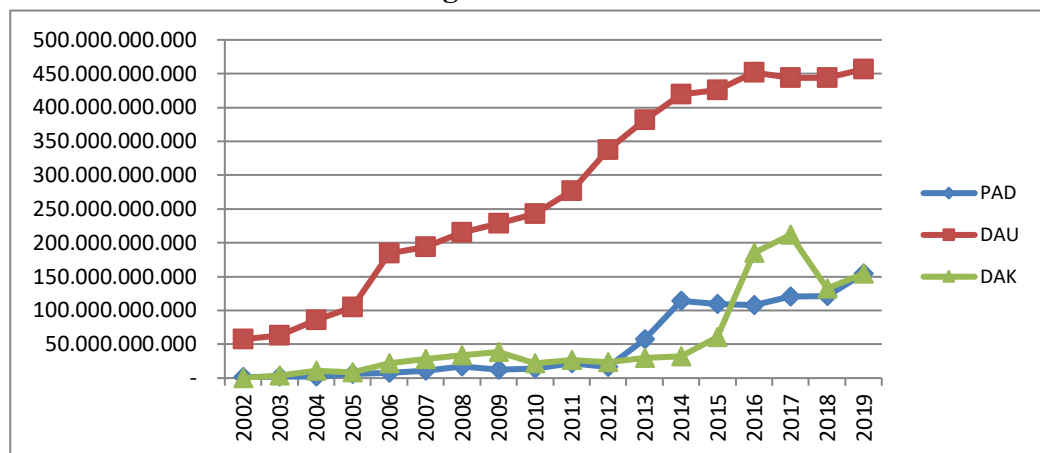
⁹ Utama, Suyana, *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali*, (Tesis Pascasarjana Denpasar, 2008), hlm. 52.

“Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi kasus pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.¹⁰

Kota Langsa merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Kota Administratif. Kota Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan undang-undang yang terbit pada tahun 2001. Wilayah Kota Langsa terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur, Langsa Kota, Langsa Baro, Langsa Barat dan Langsa Lama.

Berikut dapat diketahui mengenai nilai dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Kota Langsa tahun 2002-2018.

Gambar 1.1
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Langsa Tahun 2002-2019



¹⁰Marizka, R., *Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi kasus pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat)*, (Jurnal Akuntansi, 2013), hlm. 14.

Berdasarkan data Tabel 1.1. memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa memiliki tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 PAD terus meningkat sampai tahun 2017 tetapi di tahun 2018 sedikit menurun tetapi tahun 2019 kembali meningkat. Dana Alokasi Umum Kota Langsa berfluktuatif, hal ini terlihat pada tahun 2002 sampai tahun 2019. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berfluktuatif penerimaannya pada setiap tahunnya. Pendapatan asli daerah Kota Langsa mengalami peningkatan di tahun 2019 menurut Wakil Walikota Langsa (Dr. Marzuki Hamid, MM.¹¹ tetapi di tahun 2019 terjadi juga markup belanja di Rumah Sakit Umum mencapai 269 juta dari anggaran.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Langsa”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang didapat dari latar belakang masalah di atas, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa masih terlalu rendah bila dibandingkan dengan belanja daerah.
2. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus masih terlalu besar yang memberikan gambaran bahwa Kota Langsa masih sangat membutuhkan bantuan.

¹¹ <https://aceh.tribunnews.com/2020/02/07/realisasi-pendapatan-asli-daerah-kota-langsa-capai-rp-120-miliar-berikut-rinciannya> diakses 12 Juli 2020.

¹²<https://www.tagar.id/jaksa-tahan-wadir-rumah-sakit-di-aceh-karena-korupsi>, diakses 12 Juli 2020.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini khusus membahas mengenai kemandirian keuangan daerah Kota Langsa yang dinilai dari perolehan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa?
2. Bagaimana Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa?
3. Bagaimana Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa?
4. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain adalah:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran atau pengetahuan yang berguna bagi pembaca mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus melalui kegiatan penelitian sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan kaitannya terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
 - b. Memberi masukan kepada pemerintah Kota Langsa mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus serta kaitannya terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.

1.6. Penjelasan Istilah

Pada penelitian ini terdapat istilah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah hasil yang diperoleh pemerintah Daerah Kota Langsa berupa pajak daerah, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Dana Alokasi Umum adalah Dana transfer pusat yang diterima pemerintah Kota Langsa untuk belanja Daerah Kota Langsa sebagai belanja pegawai dan infrastruktur.
3. Dana Alokasi Khusus adalah Dana transfer pusat yang diterima pemerintah Kota Langsa untuk belanja Daerah Kota Langsa sebagai dana kegiatan khusus untuk daerah Kota Langsa sesuai dengan koordinasi antara menteri dalam negeri, menteri perencanaan pembangunan dan rencana kerja pemerintah Kota Langsa.
4. Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah Kota Langsa untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pendapatan Asli Daerah

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.¹³

Secara konseptual, pendapatan daerah berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran menjadi hak daerah. Dalam hal ini dapat melihat bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.¹⁴ Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang bersumber dari potensi daerah didalamnya termasuk pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dana perimbangan dan pendapatan pemerintah daerah lainnya yang sah menurut

¹³Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: YKPN, 2012), hlm. 94.

¹⁴Gade, L.H, *Analisis Kemandirian Daerah*, (Artikel Penelitian), hlm. 100

undang-undang. Dengan besarnya PAD suatu daerah, ini dapat memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah lebih kuat dibandingkan dengan yang memiliki PAD lebih rendah dan ini akan mengurangi tingkat ketergantungan dengan pemerintah di atasnya (jenjang pemerintah lebih tinggi).¹⁵

Pendapatan Asli Daerah yang rendah dapat menyebabkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Menurut Kuncoro (2004:13), ada lima penyebab utama rendahnya PAD, yaitu:¹⁶

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.
3. Walaupun pajak daerah cukup beragam, hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
4. Faktor yang bersifat politis, kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme.
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Selanjutnya pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui

¹⁵Sutrisno, *Dasar-dasar Keuangan Negara*, (Yogyakarta: BPFE, 2005) hlm. 203

¹⁶Kuncoro Mudarajat, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm. 13

sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang bersumber dari potensi daerah didalamnya termasuk pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dana perimbangan dan pendapatan pemerintah daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Dengan besarnya PAD suatu daerah, ini dapat memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah lebih kuat dibandingkan dengan yang memiliki PAD lebih rendah dan ini akan mengurangi tingkat ketergantungan dengan pemerintah di atasnya (jenjang pemerintah lebih tinggi).

Menurut Wempy (2017: 91) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.

2.1.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:¹⁸

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/ Kota

¹⁷*Ibid...*

¹⁸Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: YKPN, 2012), hlm. 96.

2. Retribusi Daerah, terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Undang-undang sebagai berikut:¹⁹

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.²⁰
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 tahun 2004* Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, (Jakarta, 2004).

²⁰*Ibid...*

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.²¹

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.²²
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan

²¹*Ibid....*

²²*Ibid...*

yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.²³

2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduk secara perorangan, namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:²⁴

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah
 - b. hasil retribusi daerah

²³*Ibid...*

²⁴Mardiasmo, *Dasar-dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 5.

- c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan;
3. Pinjaman daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberi izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik Negara dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba perusahaan daerah air minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

²⁵Bangsa, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 91.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih mata uang rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:²⁶

1. Pajak daerah

pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet

²⁶Resmi Siti, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 8.

- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan

2. Retribusi daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi adalah “jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu”. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.²⁷ Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis pendapatan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu meliputi sebagai berikut:²⁸
 - 1) Retribusi pelayanan kesehatan;
 - 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

²⁷*Ibid*, hlm. 9.

²⁸*Ibid*...hlm. 8.

- 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan cetak akta catatan sipil;
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 6) Retribusi pelayanan pasar;
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran;
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- 10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair;
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- 15) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 16) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- 17) Retribusi tempat pelelangan;
- 18) Retribusi terminal;
- 19) Retribusi tempat khusus parkir;
- 20) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- 21) Retribusi rumah potong hewan;
- 22) Retribusi pelayanan pelabuhan;
- 23) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- 24) Retribusi penyebrangan di Air;
- 25) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

- 26) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- 27) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- 28) Retribusi izin gangguan;
- 29) Retribusi izin trayek;
- 30) Retribusi izin usaha perikanan (UU Nomor 28 Tahun 2009).²⁹

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pengertian hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah: Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;³⁰ (2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; (3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan yang sah

Pengertian lain-lain PAD yang sah adalah: Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi:³¹

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah;

²⁹*ibid* hlm. 10.

³⁰Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: YKPN, 2012), hlm. 97.

³¹Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: YKPN, 2012), hlm. 98.

- f. Penerimaan keuangan daerah dari selisish nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. (Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.2. Dana Perimbangan

2.2.1. Pengertian Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah mengatur tentang dana perimbangan dimana dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.³²Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta

³² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Keuangan* (Jakarta, Departemen Dalam Negeri, 2005).

tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dalam konteks Indonesia saat ini, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah adalah dalam wujud Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.³³

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah:³⁴

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian "kuenasional", baik vertikal maupun horisontal.
2. Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Namun selama ini sumber dana pembangunan daerah di Indonesia masih bergantung terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Sejalan dengan itu, ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat. Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan

³³Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2012) hlm. 338

³⁴Elmi, Bachrul, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri*, (Kajian Ekonomi dan Keuangan, 2002) hlm. 21

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.³⁵

2. Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengertian dana alokasi khusus menurut undang-undang adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.³⁶
3. *Bagian Daerah, yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)* Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagi hasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

2.2.2. Pengertian Dana Alokasi Umum

Berdasarkan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.³⁷ Pada Pasal 7 undang-undang, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 tahun 2004* Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, (Jakarta, 2004).

³⁶Ibid...

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 tahun 2004* Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, (Jakarta, 2004).

kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari DAU.³⁸

Dalam Peraturan Pemerintah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat *block Grand* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pembangunan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang tentang dasar penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:³⁹

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

³⁸Ibid....

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 tahun 2004* Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, (Jakarta, 2004).

3. Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
4. Alokasi dasar yang dimaksud dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah, kebijakan dalam pengalokasian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Dana lokasi umum ditetapkan 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Besaran alokasi DAU per daerah sesuai Peraturan Presiden.
2. Proporsi pembagian DAU adalah sebesar 10% untuk daerah Provinsi dan sebesar 90% untuk daerah Kabupaten/Kota dari besaran DAU secara Nasional.
3. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula DAU, yaitu dihitung berdasarkan formula atas dasar celah fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD). CF suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan Fiskal (kbF) dengan kapasitas Fiskal (KpF), sedangkan AD dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS daerah.

2.2.3. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Pengertian DAK menurut peraturan pemerintah, Pasal 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jadi Dana Alokasi Khusus

⁴⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan*, (Jakarta, 2005).

merupakan transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (*specific grant*).⁴¹

Berdasarkan undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 38 bahwa besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Pada Pasal 39, DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, menerangkan bahwa penggunaan dana perimbangan untuk DAK agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

Selanjutnya Dana Alokasi Khusus menurut undang-undang adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu:

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum.

⁴¹ Sidik, Mahfud, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Diskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*, (Jakarta, 2002) hlm. 29

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, (Jakarta, 2004).

2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK.

Pasal 1 UU No.23/2014 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk:

1. Membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan
2. Membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Sebagai contoh, penggunaan DAK bidang pendidikan meliputi:

1. Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas,

2. Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC,
 3. Pengadaan/perbaiki meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan,
 4. Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah, dan
 5. Peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan lainnya di sekolah.
- Kebijakan DAK dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu (i) penetapan program dan kegiatan, (ii) penghitungan alokasi DAK, (iii) arah kegiatan dan penggunaan DAK, dan (iv) administrasi pengelolaan DAK

2.3. Kemandirian Keuangan Daerah

2.3.1. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam Undang-Undang terdapat pengertian otonomi daerah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.⁴³ Kemandirian daerah dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah atau disebut KKD yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁴

⁴³Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: YKPN, 2012), hlm. 61.

⁴⁴Ibid...hlm. 101.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi).⁴⁵ dengan adanya kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah dapat dipengaruhi oleh faktor pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak. Semakin tinggi perolehan hasil pajak maka semakin tinggi PAD, semakin tinggi perolehan retribusi daerah maka semakin tinggi hasil PAD dan semakin tinggi perolehan bagi hasil pajak maka semakin tinggi PAD.⁴⁶

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kondisi keuangan daerah yang memerlukan suatu pemetaan kemampuan keuangan daerah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja pemerintah kabupaten. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besar

⁴⁵Mahmudi, *Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: YKPN, 2012), hlm. 142.

⁴⁶Haryanto, Tri Joko, *Kemandirian Daerah sebuah Perspektif*, (Yogyakarta: YKPN, 2012), hlm. 9.

kecilnya perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman daerah.⁴⁷

Untuk melihat pola hubungan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.⁴⁸

Tabel 2.1
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
rendah sekali	0-25	instruktif
rendah	>25-50	konsultif
sedang	>50-75	partisipatif
tinggi	>75-100	delegatif

2.4 Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan

2.4.1. Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dan digunakan sesuai dengan potensi tiap daerah yang dimiliki. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang bisa dihasilkan dari suatu daerah, maka suatu daerah dapat akan lebih mudah membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahannya sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah tanpa bergantung dengan bantuan

⁴⁷Hehamahua, *Kemandirian Keuangan Daerah Otonomi*, (Fakultas Ekonomi Universitas Udayana: 2017), hlm. 7.

⁴⁸Dwirandra, *Efektifitas dan Kemandirian Keuanagn Daerah Otonomi Kabupaten/Kota di Provinsi bali tahun 2002-2006*, (Fakultas Ekonomi Universitas Udayana: 2017), hlm. 7.

pusat, sehingga tingkat kemandirian daerah juga akan semakin meningkat.⁴⁹ Artinya semakin tinggi PAD, maka Tingkat Kemandirian keuangan daerah juga akan semakin meningkat.

2.4.2. Pengaruh DAU terhadap Kemandirian Keuangan

Dana Alokasi Umum ialah sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Semakin kecil DAU menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah. Sebaliknya jika semakin besar DAU memberi bantuan ke pemerintah daerah maka ketergantungan daerah akan semakin meningkat.⁵⁰ Artinya semakin besar jumlah DAU, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah

2.4.3. Pengaruh DAK terhadap Kemandirian Keuangan

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus

⁴⁹Yulianto, *Kemandirian Keuanagn Daerah Otonomi*, (Universitas Negeri Jakarta: 2018), hlm. 10

⁵⁰Sari, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 31

yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. DAK yang dialokasikan pemerintah pusat ke suatu daerah dengan jumlah yang relatif besar maka dapat disimpulkan daerah dikatakan kurang mandiri karena daerah masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya.⁵¹ Artinya semakin kecil DAK, maka Tingkat Kemandirian Daerah akan semakin meningkat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

Nama	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Pratama, Muhammad Fadjar Adi, (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan Status Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa	Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah	Status daerah	Hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan status daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah. ⁵²

⁵¹Marizka, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2015), hlm. 78

⁵² Pratama, Muhammad Fadjar Adi, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah berdasarkan status pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota*

	Barat tahun 2008-2012			
Fadilah (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2010- 2015	Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan	Belanja modal dan pertumbuh an ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan serta dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. ⁵³
Nurhadisah, AI Siti,(2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten	Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan	Dana Bagi Hasil	Hasil penelitian diketahui Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan demikian dana bagi hasil berpengaruh terhadap

di Jawa Barat, (Bandung: Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Akuntansi,2014).

⁵³Fadilah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2010-2015*, (Jakarta:Fakultas Eknomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2017).

	Garut			kemandirian keuangan daerah. ⁵⁴
Ayu, Anggia, (2018)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana bagi Hasil dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandiriana Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (2013-2016)	Dana Alolasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan tingkat kemandirian	Dana bagi hasil dan Belanja modal	Hasil penelitian diperoleh bahwa Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan ⁵⁵ .
Karyadi, Santika Adhi 2017	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Motal	Pendapatan Assli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi	Belanja modal	Hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh

⁵⁴ Nurhadisah, Ai Siti, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Garut*(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univertas Sunan Gunung Jadi Bandung, 2018).

⁵⁵Ayu Anggia, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana bagi Hasil dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandiriana Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (2013-2016)*(Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2018)

	pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014	Khusus		terhadap Belanja Modal. ⁵⁶
Marizka (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2011	tingkat Kemandirian Keuangan Daerah PAD, DAU, DAK, DBH.	Belanja modal	Secara simultan, bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2006 – 2011. Secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, DAU dan DBH tidak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemandirian

⁵⁶Karyadi Santika Adhi, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Motal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014(Yogyakarta: Program Studi Akunansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

				keuangan daerah, DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten. ⁵⁷
Siagian (2014)	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2008-2012	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio efektivitas PAD, DAU, DAK, DBH.	Belanja modal	Secara parsial variabel DAU dan DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel rasio efektivitas PAD dan DBH berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/ kota di provinsi Riau tahun 2008-2012.

⁵⁷Marizka, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2011 (Jurnal Akuntansi Vol 1. No. 3, 2013)

				Secara simultan variabel rasio efektivitas PAD, DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/ kota di provinsi Riau tahun 2008-2012. ⁵⁸
Septyas (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, tax effort (Upaya Pajak), dan alokasi belanja modal di Jawa Timur	Dana alokasi umum dan tingkat kemandirian keuangan daerah	Belanja modal, PAD	Secara dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. ⁵⁹

⁵⁸Siagian, Pengaruh Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2008-2012,(Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2014)

⁵⁹Septyas, Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, tax effort (Upaya Pajak), dan alokasi belanja modal di Jawa Timur,(Jurnal Akunesa, Vol 2. No. 3 2014)

Anita (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Dana alokasi umum dan tingkat kemandirian keuangan daerah	Belanja modal, PAD	Hasil penelitian dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. ⁶⁰
Nyoman dan Leny (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung	Pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah	Belanja modal, DAU, DAK	Hasil penelitian Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. ⁶¹

2.6. Kerangka Konsep

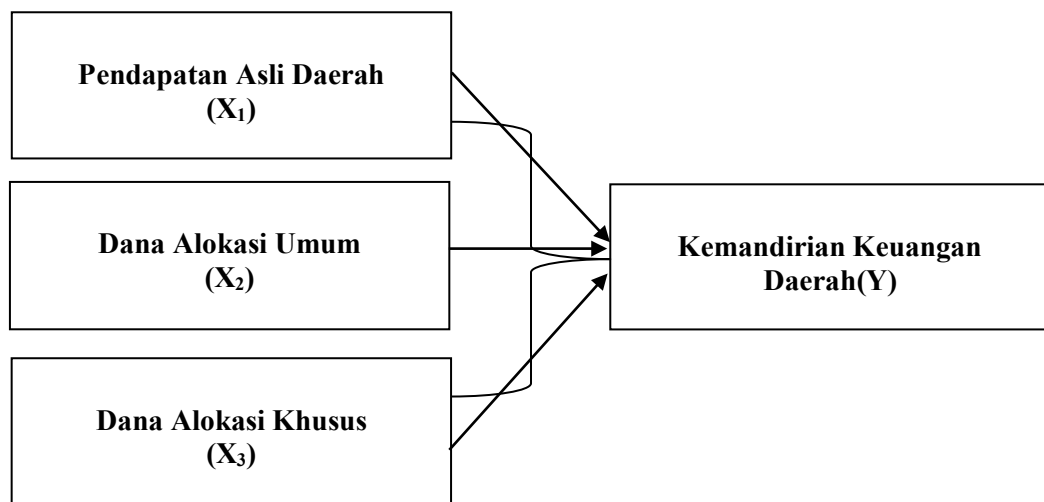
Kerangka merupakan alur yang akan dilalui peneliti sebagai dasar penelitian. Peneliti berpikir bahwa sebuah daerah harus dapat mandiri setelah bergulirnya undang-undang no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

⁶⁰Anita Lestari, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, (Jurnal Progres, Vol 1. No. 2 2016)

⁶¹Nyoman dan Leny, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung, (proceeding of Management, Vol 2. No. 3 2015)

Kemandirian suatu daerah dapat diketahui dari nilai pendapatan asli daerah yang dapat membiayai kegiatan daerahnya. Bagi daerah yang belum memiliki kecukupan pendapatan asli daerah tentunya membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat yang disebut dengan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Semakin besar jumlah dana perimbangan diterima daerah maka daerah semakin kurang mandiri. Untuk pada penelitian ini dapat dibuat kerangka pemikiran secara teoritis berupa pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.7. Hipotesis

Dalam suatu penelitian tentu memiliki hipotesis atau dugaan sementara, dan adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H₀₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
- H_{a1} : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
- H₀₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
- H_{a2} : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
- H₀₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
- H_{a3} : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
- H₀₄ : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
- H_{a4} : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Metode kuantitatif. Metode ini adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.⁶² Penelitian kuantitatif menggunakan pola berpikir deduktif (rasional-empiris atau top-down), yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena bersifat khusus. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian berupa data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran Kota Langsa.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa dengan data yang di peroleh dari badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu dan jadwal penelitian akan direncanakan pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

⁶²Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 149.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, berupa angka-angka dari laporan Realisasi Anggaran dari Pemerintah Kota Langsa. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data penelitian berasal dari data sekunder. sumber data sekunder didapatkan dari dokumentasi yaitu data laporan keuangan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa dengan data dari tahun 2002 sampai dengan 2019 serta data sekunder dari kepustakaan yaitu literatur-literatur dan pendapat para ahli dari kepustakaan dan internet.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan telah dipublikasikan. Data yang telah diperoleh meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tahun 2002-2019, secara keseluruhan data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah.

3.5. Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel

3.5.1. Identifikasi Variabel

1. Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang mendasari penelitian variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dapat di tulis dalam Y. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya mempengaruhi perilaku dari variabel terikat. Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisa kemandirian keuangan daerah, maka penelitian ini menspesifikasikan variabel dependen dan definisi operasional sebagai “Y”. Data yang digunakan adalah data perhitungan kemandirian keuangan daerah.

2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variable lain. Variabel dapat di tulis dalam X. Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah, maka penelitian ini menetapkan spesifikasi variabel independen dan definisi operasional sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan pemerintah Kota Langsa yang digali dari dalam wilayah daerah berupa pajak dan retribusi.

b. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada

daerah dalam hal ini adalah Kota Langsa atau disebut transfer atau grants untuk belanja pegawai dan pembangunan.

- c. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam hal ini adalah Kota Langsa atau disebut transfer atau grants untuk belanja khusus yang ditetapkan pemerintah Kota Langsa dengan persetujuan Kementerian dalam Negeri serta kementerian keuangan.

3.5.2. Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rupiah
Dana Alokasi Umum (X_2)	Merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk daerah yang digunakan untuk belanja pegawai dan pembangunan.	Rupiah
Dana Alokasi Khusus (X_3)	Merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk daerah yang digunakan untuk khusus.	Rupiah
Kemandirian daerah (Y)	Kemandirian daerah adalah melihat seberapa besar jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah, jadi daerah yang mandiri adalah daerah yang mendapat bantuan dari pusat	Persentase

	<p>seminimal mungkin. Di era otonomi daerah, kemandirian merupakan suatu hal yang mutlak agar program-program pemerintah daerah dapat terealisasi. Tingkat kemandirian diperoleh dengan cara membandingkan Total Pendapatan Asli Daerah dengan total dana perimbangan.</p>	
--	--	--

3.6. Teknik Analisis Data

1. Persamaan regresi linier Berganda

Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah .

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan.⁶³

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

a = konstanta

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Alokasi Umum

X₃ = Dana Alokasi Khusus

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi

⁶³Supranto, *Statistika*, (Yogyakarta: Andi, 2010) hlm 267

2. Uji t (Uji hipotesis secara parsial)

Untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas menggunakan SPSS.

Bentuk pengujiannya:

$H_0: \beta = 0$, artinya masing-masing variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a: \beta \neq 0$, artinya masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. H_0 diterima jika $t_{sig} > \alpha = 5\%$
- b. H_a diterima jika $t_{sig} < \alpha = 5\%$

3. Uji F (Uji hipotesis secara simultan)

Dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, perlu dilakukan pengujian koefisien regresi secara serentak. Pengujian menggunakan derajat signifikansi nilai F. Pengujian ini menggunakan software SPSS.

Bentuk pengujiannya:

$H_0: \beta = 0$, artinya semua variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a: \beta \neq 0$, artinya semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- c. H_0 diterima jika $F_{sig} > \alpha = 5\%$
- d. H_a diterima jika $F_{sig} < \alpha = 5\%$

6 Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan total variasi dari Y (variabel terikat atau independen) dari suatu persamaan regresi. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai R Square atau R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi variasi variabel.⁶⁴

7. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari:

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal *probability plot* dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan

⁶⁴ Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2016) hlm 95

ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji statistik dilakukan uji *one sample Kolmogorov Smirnov Test*, jika nilai Kolmogorov Smirnov signifikannya di atas $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.⁶⁵

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan *variance* residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau homokedastisitas, dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatter plot* model tersebut. Bila titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas

⁶⁵Ibid... hlm 96

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji statistik dilakukan dengan uji Glejser, jika variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁶⁶

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi).Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (W test).⁶⁷Pengambilan keputusan:

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan ada tidaknya Autokorelasi

Keterangan	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokoeralasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif dan negatif	Tidak ditolak	$Du < d < 4-du$

⁶⁶Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2016) hlm 97

⁶⁷Ibid hlm. 110.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu pemerintahan di Provinsi Aceh yang berdiri sejak 17 Oktober 2001. Kota Langsa dahulunya adalah ibukota Kabupaten Aceh Timur yang kemudian dimekarkan menjadi pemerintahan Kota dan Kabupaten Aceh Timur dengan ibukota yang baru yaitu Idi Rayeuk. Kotadibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001. Kota yang terletak dipesisir pantai timur.

Provinsi Aceh ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Timur. Secara geografis, kedudukan kota berada pada titik koordinat antara 040° 24' - 35,68' - 0403347' - 0,3' Lintang Utara (LU) dan 97053' 14,59' - 98004' 42,16' Bujur Timur (BT).

Luas wilayah kota mencapai 239,83 kilometer persegi (km²), atau setara 0,41 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km²) dengan batas Kota Langsa adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara adalah Selat Malaka
2. Sebelah selatan adalah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur
3. Sebelah timur adalah Kabupaten Aceh Tamiang
4. Sebelah barat adalah Kabupaten Aceh Timur

Dengan demikian sebagai kota yang sedang tumbuh dan berkembang di Aceh, kota berbatasan langsung dengan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Timur

dan Kabupaten Aceh Tamiang serta dengan selat Melaka. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan bagian barat dengan Kabupaten Aceh Timur. Adapun di sebelah selatan kota berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Kedudukan kota yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai timur Aceh, merupakan nilai strategis dan peluang yang perlu dimanfaatkan pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah pantai timur Aceh, dengan memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah ketinggian dan kerendahan di sekitarnya, terutama di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang.

Kota Langsa terletak di daerah pesisir dan merupakan daerah yang berdekatan dengan Sumatera Utara serta berada di daerah perlintasan yaitu lintas timur yang menghubungkan kota-kota di pulau sumatera. Kota Langsa pada saat dimekarkan hanya memiliki 3 kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Kota. Kemudian seiring dengan perkembangan daerah perkotaan dan penambahan jumlah penduduk Kota Langsa di bagi menjadi 5 kecamatan. Kelima kecamatan tersebut dimekarkan pada tahun 2010 yaitu:

1. Kecamatan Langsa Timur
2. Kecamatan Langsa Kota
3. Kecamatan Langsa Barat
4. Kecamatan Langsa Lama
5. Kecamatan Langsa Baro

Wilayah Kota Langsa yang berada di perlintasan dan letaknya yang dekat

dengan Ibukota Provinsi Sumatera Utara menjadikan daerah ini dapat dengan mudah menjalin kerjasama perdagangan dan jasa serta pengembangan wisata. Oleh karena itu sebagai wujud upaya menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai timur Aceh, akan diupayakan penyediaan infratraktur maupun fasilitas layanan pendukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. Sektor pariwisata yang sudah berkembang saat ini dan banyak dikunjungi wisatawan dari daerah lain seperti dari Sumatera Utara dan dari daerah Aceh Lainnya menjadikan perkenomian di Kota Langsa semakin baik. Selain daerah wisata Kota Langsa juga memiliki aktivitas ekonomi yang terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya dengan perekonomian lebih banyak dari sektor perdagangan dan industri. Dengan demikian secara sektoral potensi sektor yang menjadi andalan dalam mendorong perekonomian kota Langsa dari sektor perdagangan. Dalam memanfaatkan peluang ekonomi sebagai kota transit di wilayah timur Aceh, terus diupayakan secara bertahap peningkatan fasilitas pendukung termasuk pembangunan pasar kota. Selain itu Kota Langsa saat ini sudah menjadi kota pendidikan yang dapat dilihat dari adanya 3 perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Samudra dan Institut Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa, Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia serta perguruan tinggi swasta yang terdiri dari Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pase Langsa, Akademi Kebidanan Harapan Ibu, Akademi Keperawatan Cut Nyak Dhien Langsa dan Lembaga Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat mengembangkan perekonomian kota Langsa.

Perkembangan perekonomian ini didukung dengan penduduk yang berkualitas dan produktif serta menjadikan tujuan utama dari pencapaian pembangunan yang diharapkan Pemerintah Kota. Kualitas penduduk yang meningkat serta berdaya saing tinggi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendayagunaan potensi sumberdaya ekonomi secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mewujudkan pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera. Karena itu, potensi sumber daya manusia (SDM) masyarakat kota diharapkan lebih berdayaguna secara optimal dalam memainkan peran dan fungsi sosial kemasyarakatan serta berperan aktif dalam proses pembangunan. Apabila hal ini tidak dilakukan, dikhawatirkan keberadaan SDM tersebut justru menjadi beban dan dapat menghambat pembangunan di masa mendatang.

Perkembangan aktivitas ekonomi yang menunjukkan tren yang terus membaik di kota selama ini, dinilai ikut memiliki implikasi terhadap kecenderungan peningkatan jumlah penduduk kota dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah penduduk yang kian meningkat tersebut disebabkan oleh kenaikan angka kelahiran, di samping juga adanya migrasi masuk ataupun perpindahan penduduk dari daerah lain ke kota untuk menetap sekaligus mencari penghidupan yang lebih layak. Langsa termasuk kota yang sangat terbuka bagi masyarakat lain, termasuk dalam hal ini sebagai lokasi/tempat usaha dan berinvestasi bagi warga pendatang. Kondisi tersebut pula yang dimanfaatkan sebagai peluang bagi pendatang untuk terus menjalankan aktivitas ekonomi serta menetap di kota. Pada sisi lainnya, angka penambahan jumlah penduduk tersebut

tentunya perlu diikuti dengan upaya penyediaan lapangan kerja yang memadai, terutama bagi penduduk yang tergolong dalam usia ataupun angkatan kerja. Selain itu, bagi penduduk yang berusia sekolah harus pula mendapatkan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas menurut jenjang pendidikan.

Distribusi dan sebaran jumlah penduduk kota relatif belum merata di setiap wilayah kecamatan. Secara rata-rata kepadatan jumlah penduduk di wilayah kota masih belum cukup merata atau sebanding dengan luas wilayah dari tiap kecamatan. Terdapat sejumlah kecamatan dengan wilayah yang relatif luas, namun belum diimbangi dengan kuantitas atau jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut. Kondisi ini antara lain terlihat di wilayah Kecamatan Langsa Timur, di mana rata-rata kepadatan penduduk di kecamatan tersebut 180 jiwa/km². Wilayah yang relatif luas namun tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang memadai mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi lokal (bps.kota Langsa).

Kemudian berdasarkan dukungan daerah wisata, daerah pendidikan diharapkan dapat mendukung perekonomian Kota Langsa. perekonomian ini juga didukung dengan adanya pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dari pajak hotel, pajak restoran, pajak sarang walet dan retribusi dari parkir, sampah, dan lainnya. Secara keseluruhan diharapkan dapat memberikan pendapatan untuk daerah.

4.2. Statistik Deskriptif

Berdasarkan data penelitian yang terdiri dari variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah/PAD, Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK) serta variabel terikat kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan pada penelitian ini sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dapat di deskripsikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah untuk Kota Langsa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: djpk Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

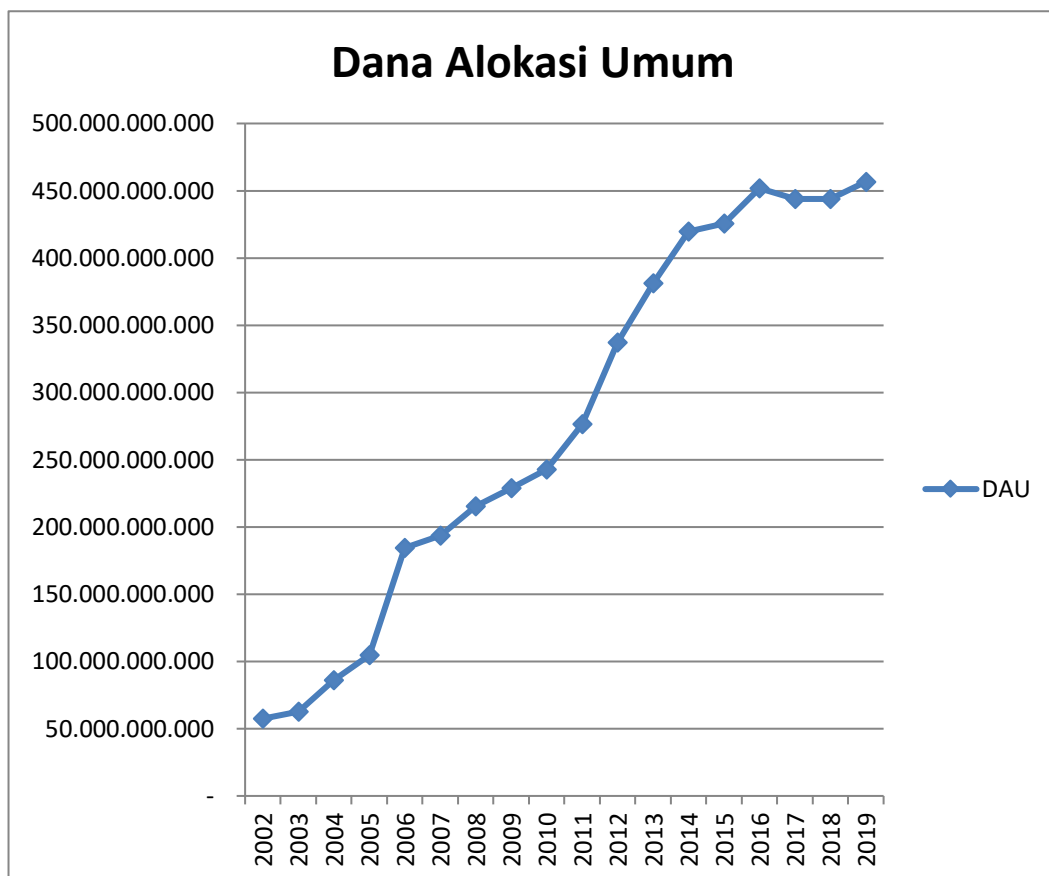
Gambar 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tahun 2002-2019

Berdasarkan gambar tersebut maka dapat diketahui perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019.). Secara deskriptif diketahui pendapatan asli daerah dari tahun 2002

sampai dengan 2019 sebesar Rp 897.088.015.911 kemudian rata-rata pendapatan asli daerah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 Kota Langsa sebesar Rp 49.838.223.106. Selanjutnya nilai tertinggi perolehan pendapatan asli daerah Kota Langsa dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 Rp 154.453.194.164 yaitu pada tahun 2019. Sementara nilai terendah perolehan pendapatan asli daerah Kota Langsa Rp 1.400.090.000 di tahun 2002.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Kota Langsa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.



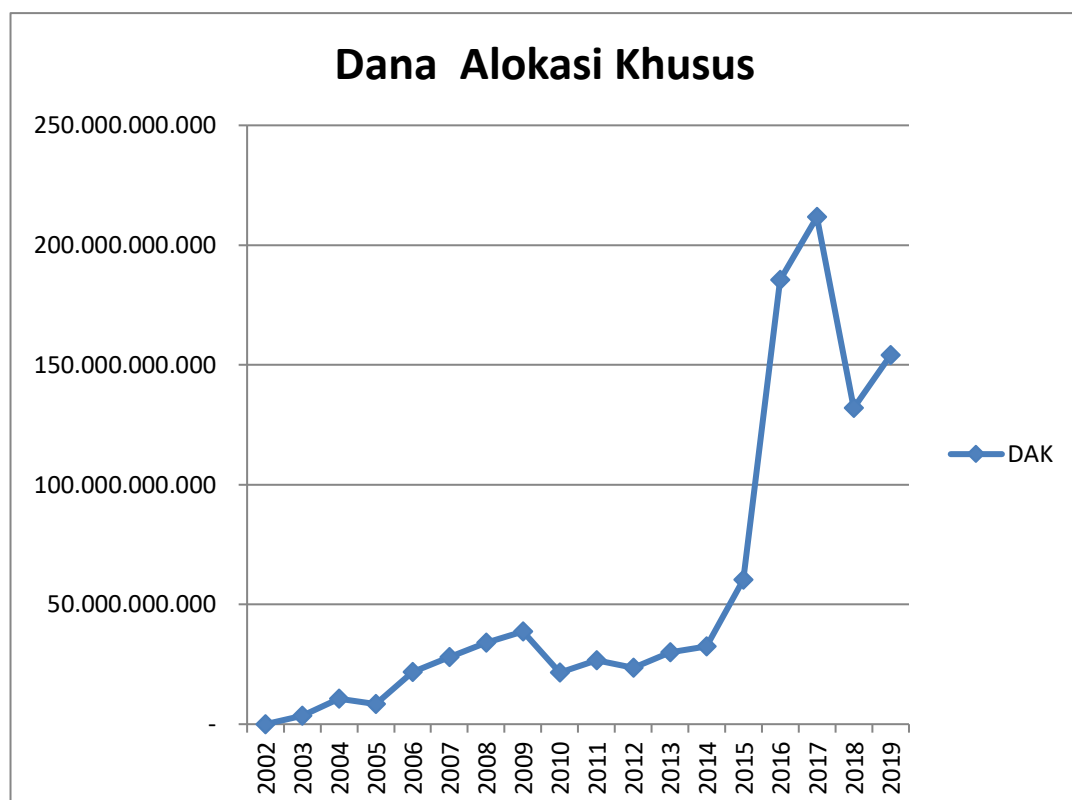
Sumber: djpk Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

Gambar 4.2 Dana Alokasi Umum Kota Langsa tahun 2002-2019

Berdasarkan gambar tersebut maka dapat diketahui perkembangan perolehan Dana Alokasi Umum Kota Langsa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019. Secara statistik juga diketahui nilai penerimaan dari pemerintah pusat yaitu dana alokasi umum jumlahnya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.012.739.739.680 dan rata-rata jumlah dana alokasi umum dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 278.485.541.093 dan nilai tertinggi dana alokasi umum yang diterima pemerintah Kota Langsa dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 456.700.561.000 yang diperoleh pada tahun 2019 sementara nilai perolehan dana alokasi umum terendah yaitu pada tahun 2002 sebesar Rp 57.480.000.000.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Kota Langsa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada grafik berikut ini:



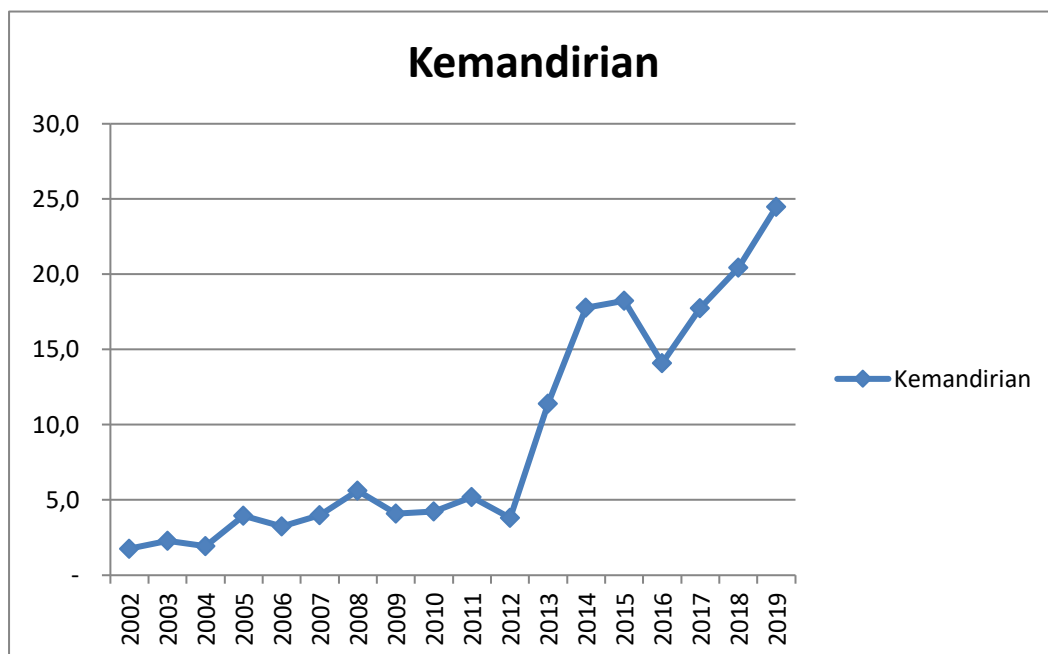
Sumber: djpk Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

Gambar 4.3 Dana Alokasi Khusus Kota Langsa tahun 2002-2019

Berdasarkan gambar tersebut maka dapat diketahui perkembangan perolehan dana alokasi khusus Langsa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019. Dana alokasi khusus yang diterima pemerintah Kota Langsa dari pemerintah pusat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.022.524.832.048 dengan rata-rata selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 56.806.935.114. selanjutnya dana alokasi khusus yang diterima tertinggi di tahun 2017 dengan besaran Rp 211.722.423.308 dan yang terendah di tahun 2002 atau tidak ada dana alokasi khusus di tahun tersebut.

4. Kemandirian

Kemandirian keuangan yang diketahui berdasarkan pendapatan (anggaran dan realisasi) Kota Langsa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: djpk Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

Gambar 4.4 Kemandirian Kkeuangan Kota Langsa tahun 2002-2019

Berdasarkan gambar tersebut maka dapat diketahui perkembangan perolehan dana alokasi khusus Langsa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019. Kemandirin keuangan yang diperoleh dari nilai realisasi pendapatan asli daerah dibagi dengan total dana perimbangan secara umum masih rendah. Jumlah rasio kemandirian keuangan daerah Kota Langsa tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 164%, sementara rata-rata kemandirian dari tahun 2002 ssaampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 9%. Kemudian kemandirian daerah yang tertinggi adalah sebesar 24% sementara kemandirian terendah adalah sebesar 1,8 yaitu pada tahun 2002. Kemudian dapat diketahui juga berdasarkan jumlah, rata-rata, nilai tertinggi dan terendah pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan
Kemandirian Daerah Kota Langsa
Tahun 2002-2019

Tahun	PAD	DAU	DAK	Kemandirian
Jumlah	897.088.015.911	5.012.739.739.680	1.022.524.832.048	164
Rata-rata	49.838.223.106	278.485.541.093	56.806.935.114	9
Maksimum	154.453.194.164	456.700.561.000	211.722.423.308	24
Minimum	1.400.090.000	57.480.000.000	-	1,8

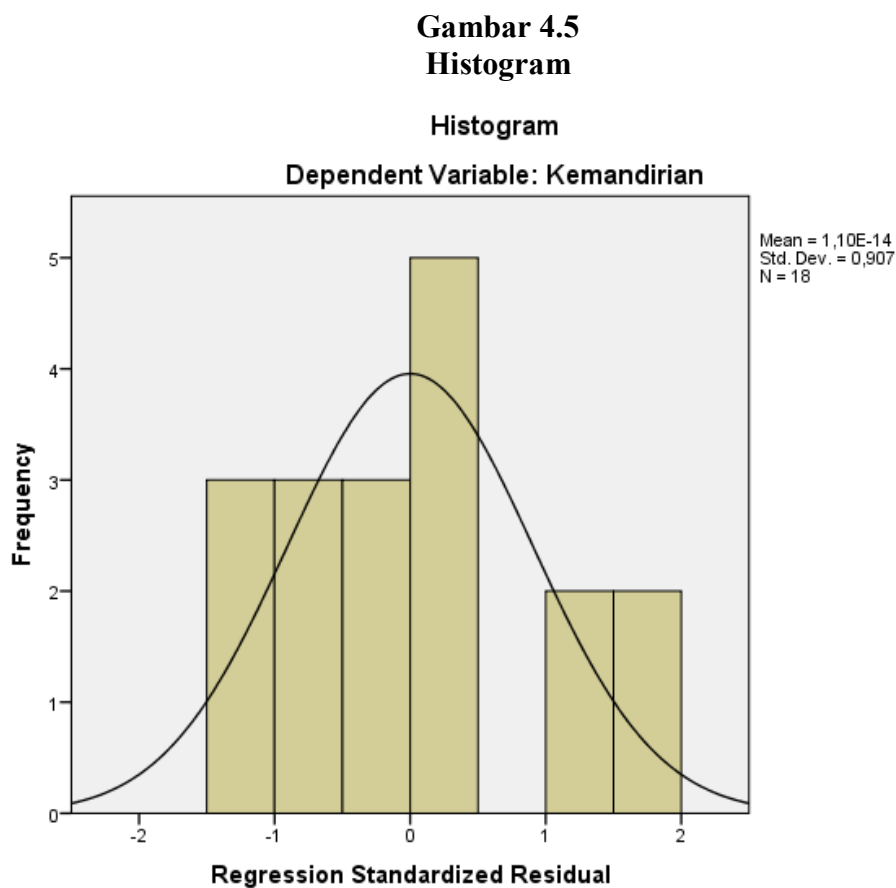
Sumber: djpk Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

4.3. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah uji yang dilakukan pada penelitian ini yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Hasil uji asumsi klasik dapat diketahui sebagai berikut:

4.3.1. Uji Normalitas

Normalitas pengujian dilakukan dengan melihat gambar grafik berupa Histogram. Hasil uji normalitas dengan histogram, yaitu.



Sumber: hasil olah data, 2020

Hasil uji normalitas dengan menggunakan histogram diketahui bahwa kurva membentuk lonceng dengan garis lengkungan tidak terlalu miring di

sebelah kanan atau sebelah kanan, sehingga data dapat dinyatakan berdistribusi normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model terdapat korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi dengan menggunakan nilai tolerance dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Log PAD	,104	9,627
Log DAU	,101	9,900
Log DAK	,628	1,592

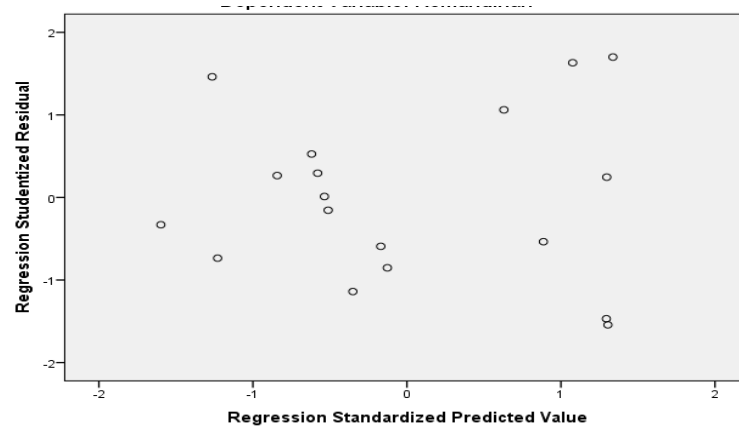
Sumber: hasil olah data, 2020

Tabel 4.2. dapat diketahui hasil uji multikolinearitas, terdapat nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai variance Inflation Factor (VIF) > 10 . Pada variabel PAD tolerance $< 0,1$ ($0,104 < 0,1$), VIF < 10 ($9,627 < 10$). Variabel DAU tolerance $< 0,1$ ($0,101 < 0,1$), VIF < 10 ($9,900 < 10$). Variabel DAK tolerance $< 0,1$ ($0,628 < 0,1$), VIF < 10 ($1,592 < 10$). Dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.3. Uji Heterokedastisitas.

Pengujian heterokedastisitas untuk menguji apakah model regresi terdapat ketiaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji dilakukan dengan grafik scatterplot.

Gambar 4.6
Scaterplots



Sumber: hasil olah data, 2020

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui scatterplot dengan titik-titik tidak membentuk satu kumpulan melainkan berpencar dan berada di antara titik 0 sumbu Y. berdasarkan gambar tersebut maka dapat dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas pada data penelitian.

4.3.4. Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,988 ^a	,977	,972	,06382	2,130

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber: hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa:

$$DW = 2,130 \text{ (d)}$$

$$dl = 0,896 \text{ (diperoleh dari } n = 17, k = 4)$$

$$du = 1,710$$

$$(4-dl) = 3,104$$

$$(4-du) = 2,290$$

$du < d < 4 - du$, yaitu $1,710 < 2,130 < 2,290$ berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan keputusan tidak ditolak.

4.4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh negatif atau positif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program statistik yaitu SPSS versi 20,0. Hasil pengujian sebagai berikut.

Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,039	1,191		1,632	,974
1 Log PAD	,843	,071	1,504	11,092	,000
Log DAU	-,688	,163	-,4227	-4,227	,001
Log DAK	-,005	,008	-,599	-,559	,559

a. Dependent Variable: Log Kemandirian

Sumber: hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel 4.4. maka hasil persamaan sebagai berikut:

$$\log Y = 0,039 + 0,843 \log X_1 - 0,688 \log X_2 - 0,005 \log X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,039 merupakan nilai dari kemandirian keuangan daerah Kota Langsa sebelum dipengaruhi oleh variabel PAD, DAU dan DAK.
2. Koefisien regresi variabel PAD sebesar 0,843 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel PAD sebesar 1% maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Langsa sebesar 0,843% dengan asumsi variabel DAU dan DAK tetap atau tidak mengalami perubahan.
3. Koefisien regresi variabel DAU sebesar -0,688 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel DAU sebesar 1% maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah Kota Langsa sebesar 0,688% dengan asumsi variabel PAD dan DAK tetap atau tidak mengalami perubahan.
4. Koefisien regresi variabel DAK sebesar -0,005 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel DAK sebesar 1% maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah Kota Langsa sebesar 0,005% dengan asumsi variabel PAD dan DAU tetap atau tidak mengalami perubahan.

4.5. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan uji t (uji secara parsial) dan uji F (uji secara simultan).

1. Uji t (uji secara parsial)

Pengujian secara parsial dilakukan dengan membandingkan nilai t sig dan α 5%. Nilai t sig dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Hasil Analisis Uji T

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,039	1,191		1,632	,974
1 Log PAD	,843	,071	1,504	11,092	,000
Log DAU	-,688	,163	-4,227	-4,227	,001
Log DAK	-,005	,008	-,599	-,559	,559

a. Dependent Variable: Log Kemandirian

Sumber: hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel tersebut maka uji t sebagai berikut:

- a. Uji t variabel PAD terhadap kemandirian keuangan, diperoleh $t \text{ sig} < \alpha$ 5% ($0,000 < 0,05$) H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat dinyatakan secara parsial PAD memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini karena semakin besar perolehan PAD maka belanja daerah akan lebih banyak menggunakan PAD dan mengurangi bantuan dari pemerintah pusat.
- b. Uji t variabel DAU terhadap kemandirian keuangan, diperoleh $t \text{ sig} < \alpha$ 5% ($0,001 < 0,05$) H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat dinyatakan secara parsial DAU memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini karena semakin besar perolehan DAU maka belanja daerah akan lebih banyak menggunakan DAU dan akan menambah terus dana dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah Kota Langsa semakin tidak mandiri.
- c. Uji t variabel DAK terhadap kemandirian keuangan, diperoleh $t \text{ sig} > \alpha$ 5% ($0,585 > 0,05$) H_0 diterima dan H_a ditolak, dapat dinyatakan secara parsial DAK memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini karena semakin besar perolehan DAK maka

belanja daerah akan lebih banyak menggunakan DAK dan mengurangi bantuan dari pemerintah pusat.

2. Uji F (uji secara simultan)

Uji secara simultan dilakukan dengan membandingkan nilai F sig pada tabel 4.6 dan nilai α 5%.

Tabel 4.6
Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,383	3	,794	195,050	,000 ^b
	Residual	,057	14	,004		
	Total	2,440	17			

a. Dependent Variable: Log Kemandirian

b. Predictors: (Constant), Log DAK, Log PAD, Log DAU

Sumber: Hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui nilai F sig $< \alpha$ 5% (0,00<0,05) Ho ditolak dan Ha diterima dan dapat dinyatakan secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Langsa.

4.6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi diketahui dari tabel Model Summary yaitu:

Tabel 4.7
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,988 ^a	,977	,972	,06382

a. Predictors: (Constant), Log DAK, Log PAD, Log DAU

b. Dependent Variable: Log Kemandirian

Sumber: Hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) dari kolom *Adjusted R Square* sebesar 0,972 atau bila dipersentasekan maka 97,2% variabel bebas (PAD, DAU dan DAK) dapat menjelaskan kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah benar-benar dapat dilihat atas PAD, DAU dan DAK yang diperoleh. Semakin besar PAD maka daerah semakin mandiri dan sebaliknya. Sementara semakin besar DAU dan DAK maka daerah semakin tidak mandiri karena terus bergantung pada pemerintah pusat.

4.7. Analisis

4.7.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan di Kota Langsa berdasarkan hasil penelitian dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,843 dan sig 0,000. Hasil tersebut dikarenakan pendapatan asli daerah yang semakin meningkat perolehannya maka akan semakin mandiri suatu daerah dan semakin sedikit penerimaan dari pemerintah pusat. Kemudian bagi daerah yang mandiri akan semakin mudah mengelola daerahnya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama Muhamad Fadjar Adi (2014) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah berdasarkan status pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2008-2012, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.7.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian

Pengaruh negatif dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan di Kota Langsa berdasarkan hasil penelitian dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,688 dan sig 0,001. Hasil tersebut dikarenakan dana alokasi umum yang semakin meningkat penerimaannya maka daerah akan semakin tidak mandiri dan semakin sedikit penerimaan dari pemerintah pusat maka akan semakin mandiri. Selama ini pemerintah daerah masih sangat besar berharap terhadap Dana Alokasi Umum untuk membelanjai daerah, hal tersebut karena pendapatan asli daerah masih terlalu kecil untuk memenuhi belanja daerah sehingga daerah Kota Langsa masih belum mandiri dalam hal keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukakan oleh Ayu Anggia (2018) dengan judul penelitian pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (2013-2016), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.7.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian

Pengaruh negatif dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan di Kota Langsa berdasarkan hasil penelitian dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,005 dan sig 0,559. Hasil tersebut dikarenakan dana alokasi khusus yang semakin meningkat penerimaannya maka daerah akan semakin tidak mandiri dan semakin sedikit penerimaan dari pemerintah pusat maka akan semakin mandiri. Selama ini pemerintah daerah masih sangat besar berharap terhadap Dana Alokasi Khusus untuk membelanjai daerah, hal tersebut karena pendapatan asli daerah masih terlalu kecil untuk memenuhi belanja daerah sehingga daerah Kota Langsa

masih belum mandiri dalam hal keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu Anggia (2018) dengan judul penelitian pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (2013-2016), dan Siagian (2014) bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh atas penelitian ini, dapat ditarik kesimpulannya:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Langsa.

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Melalui hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kemandirian daerah Kota Langsa yang belum mandiri, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti daerah lain apakah telah mandiri atau belum.
2. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada pemerintah kota langsa, dimana daerah belum mandiri, sehingga disarankan untuk dapat meningkatkan PAD sehingga daerah dapat mandiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ayu Anggia. 2018. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana bagi Hasil dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (2013-2016), Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Bastian, Indra. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Erlangga.
- Batafor. G.G. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten lembata-Provinsi NTT*. Tesis: Pascasarjana Denpasar.
- Dwirandra. 2017. *Efektifitas dan Kemandirian Keuanagn Daerah Otonomi Kabupaten/Kota di Provinsi bali tahun 2002-2006*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Elmi, Bachrul. 2002. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri*. Kajian Ekonomi dan Keuangan.
- Fadilah 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2010-2015*. Jakarta: Fakultas Eknomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Gade, L.H. 2015. *Analisis Kemandirian Daerah*. Artikel Penelitian
- Ghozali Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

- Halim, Abdul. 2012. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YKPN.
- Haryanto, Tri Joko. 2012. *Kemandirian Daerah sebuah Perspektif*. Yogyakarta: YKPN.
- Karyadi Santika Adhi. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Motal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014. Yogyakarta: Program Studi Akunansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kasiram. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Marizka, R. 2013. *Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi kasus pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat)*. Jurnal Akuntansi, 2013.
- Nurhadisah, Ai Siti. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Garut (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univertas Sunan Gunung Jadi Bandung*.
- Pratama, Muhammad Fadjar Adi. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah berdasarkan status pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat*. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Akuntansi.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Keuangan*. Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta. 2004.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Sidik, Mahfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Diskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Sutrisno. 2005. *Dasar-dasar Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE.

Utama, Suyana. 2008. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali*. Tesis Pascasarjana Denpasar.

Lampiran 1 PAD, DAU, DAK dan Kemandirian

Tahun	PAD	DAU	DAK	Kemandirian
2002	1.400.090.000	57.480.000.000	-	1,8
2003	2.062.480.000	62.640.000.000	3.414.500.000	2,3
2004	2.395.890.000	85.993.210.000	10.653.020.000	1,9
2005	6.073.630.000	104.780.000.000	8.310.000.000	4,0
2006	7.692.710.000	184.320.000.000	21.720.000.000	3,3
2007	10.887.025.267	193.579.000.000	27.934.000.000	4,0
2008	17.134.694.645	215.308.983.000	33.990.000.000	5,6
2009	12.843.093.264	228.871.823.000	38.739.000.000	4,1
2010	14.314.098.075	242.958.510.630	21.624.700.000	4,2
2011	21.612.910.030	276.338.473.050	26.684.674.225	5,2
2012	16.666.942.465	337.337.339.000	23.604.620.000	3,8
2013	57.243.381.959	381.240.982.000	29.920.830.000	11,4
2014	114.168.702.058	419.767.005.000	32.355.330.000	17,8
2015	109.116.860.676	425.446.753.000	60.351.491.000	18,3
2016	107.524.781.242	451.951.928.000	185.520.319.052	14,1
2017	120.138.956.032	444.012.586.000	211.722.423.308	17,7
2018	121.358.576.034	444.012.586.000	131.946.202.463	20,4
2019	154.453.194.164	456.700.561.000	154.033.722.000	24,5

Jumlah	897.088.015.911	5.012.739.739.680	1.022.524.832.048	164
Rata-rata	49.838.223.106	278.485.541.093	56.806.935.114	9
Maksimum	154.453.194.164	456.700.561.000	211.722.423.308	24
Minimum	1.400.090.000	57.480.000.000	-	1,8

Data untuk persamaan regresi yang dilog

Tahun	X1	X2	X3	Y
2002	9,1	10,8	0,0	0,2
2003	9,3	10,8	9,5	0,4
2004	9,4	10,9	10,0	0,3
2005	9,8	11,0	9,9	0,6
2006	9,9	11,3	10,3	0,5
2007	10,0	11,3	10,4	0,6
2008	10,2	11,3	10,5	0,7
2009	10,1	11,4	10,6	0,6
2010	10,2	11,4	10,3	0,6
2011	10,3	11,4	10,4	0,7
2012	10,2	11,5	10,4	0,6
2013	10,8	11,6	10,5	1,1
2014	11,1	11,6	10,5	1,2
2015	11,0	11,6	10,8	1,3
2016	11,0	11,7	11,3	1,1
2017	11,1	11,6	11,3	1,2
2018	11,1	11,6	11,1	1,3
2019	11,2	11,7	11,2	1,4

Lampiran 2 output SPSS

Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Log PAD	18	1400090000	154453194164	49838223106,17	54081661523,28 0
Log DAU	18	57480000000	456700561000	278485541093,3 3	145255425736,3 74
Log DAK	18	0	211722423308	56806935113,78	65850749959,23 4
Log Kemandirian keuangan	18	2	25	9,11	7,599
Valid N (listwise)	18				

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT YY
  /METHOD=ENTER XX1 XX2 XX3
  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
  /SAVE RESID.

```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Log DAK, Log PAD, Log DAU ^b		Enter

a. Dependent Variable: Log Kemandirian

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,988 ^a	,977	,972	,06382

a. Predictors: (Constant), Log DAK, Log PAD, Log DAU

b. Dependent Variable: Log Kemandirian

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,383	3	,794	195,050	,000 ^b
	Residual	,057	14	,004		
	Total	2,440	17			

a. Dependent Variable: Log Kemandirian

b. Predictors: (Constant), Log DAK, Log PAD, Log DAU

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-.039	1,191		-.033	,974		
	Log PAD	,843	,071	1,504	11,864	,000	,104	9,627
	Log DAU	-.688	,163	-.543	-4,227	,001	,101	9,900
	Log DAK	-.005	,008	-.031	-.599	,559	,628	1,592

a. Dependent Variable: Log Kemandirian

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PAD	DAU	DAK
1	1	3,960	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,038	10,149	,00	,00	,00	,70
	3	,002	51,158	,04	,17	,00	,27
	4	4,327E-005	302,505	,96	,83	1,00	,03

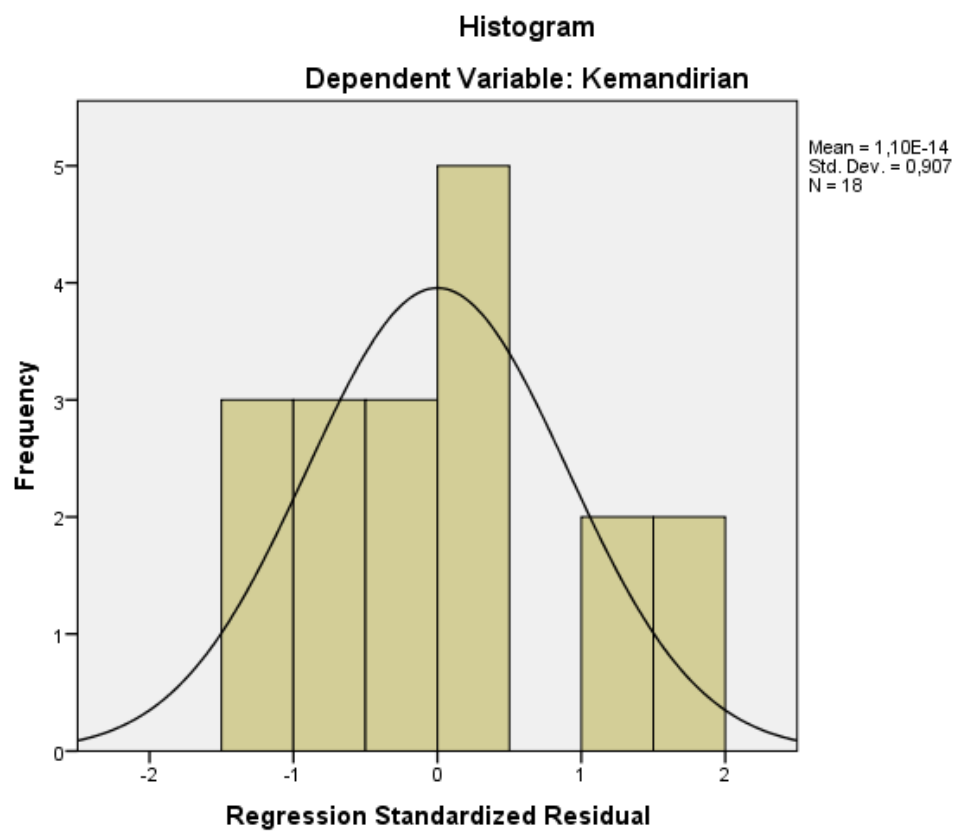
a. Dependent Variable: Log Kemandirian

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	,2019	1,3008	,8000	,37440	18
Std. Predicted Value	-1,597	1,338	,000	1,000	18
Standard Error of Predicted Value	,017	,064	,028	,011	18
Adjusted Predicted Value	,2815	1,3095	,8114	,35957	18
Residual	-.08856	,09919	,00000	,05791	18
Std. Residual	-1,388	1,554	,000	,907	18
Stud. Residual	-1,543	1,701	-.008	1,006	18
Deleted Residual	-.22967	,11877	-.01141	,08958	18
Stud. Deleted Residual	-1,632	1,840	,002	1,049	18
Mahal. Distance	,229	15,912	2,833	3,544	18
Cook's Distance	,000	3,211	,234	,747	18
Centered Leverage Value	,013	,936	,167	,208	18

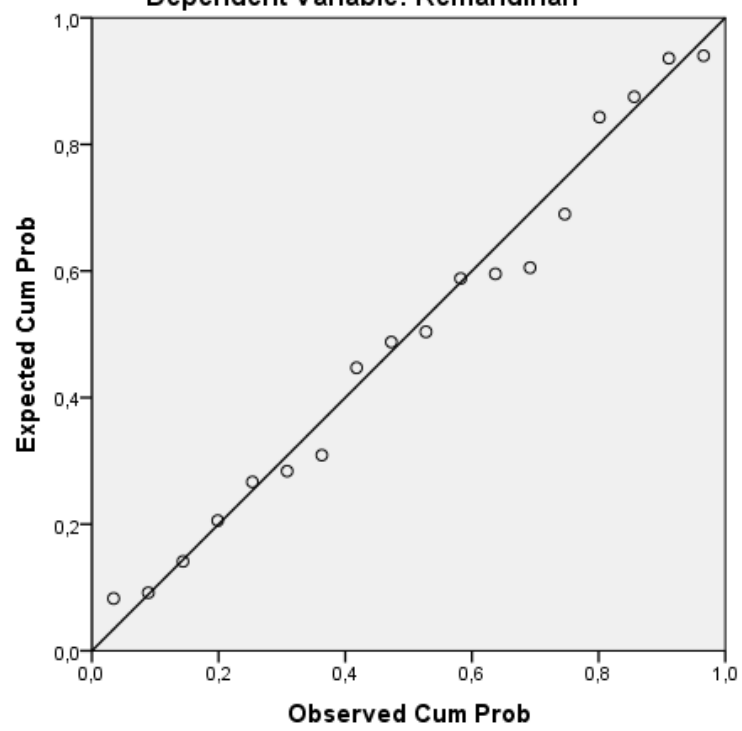
a. Dependent Variable: Log Kemandirian

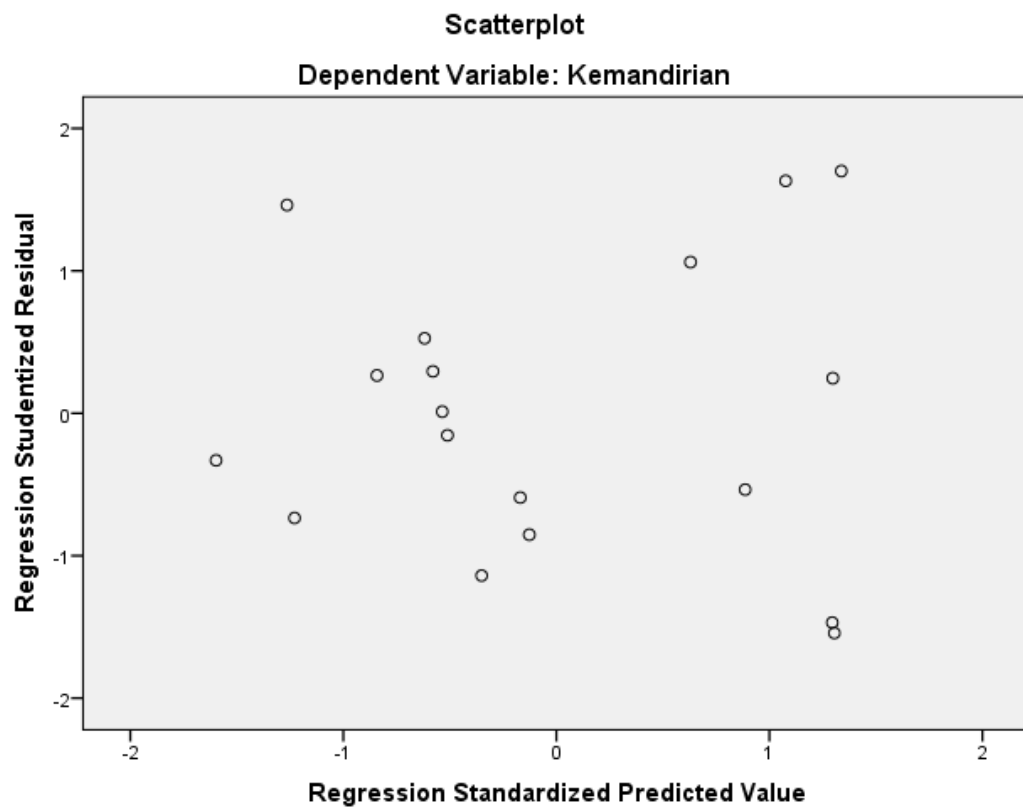
Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kemandirian





Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,988 ^a	,977	,972	,06382	2,130

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Kemandirian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Khairani
2. NIM : 4012017085
3. Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 02 Juni 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Dusun Samudra, Desa Meurandeh,
Kecamatan Langsa Lama, Kabupaten Kota Langsa

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan TK Tunas Harapan Alue Buloh. Berijazah tahun 2005
2. Tamatan SD Negeri 2 Meurandeh. Berijazah tahun 2011.
3. Tamatan SMP Negeri 5 Langsa. Berijazah tahun 2014.
4. Tamatan SMA Negeri 3 Langsa. Berijazah tahun 2017.

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbankan Syariah IAIN Langsa
(2019-2020)

Langsa, 23 Agustus 2021



Khairani